

BAB I

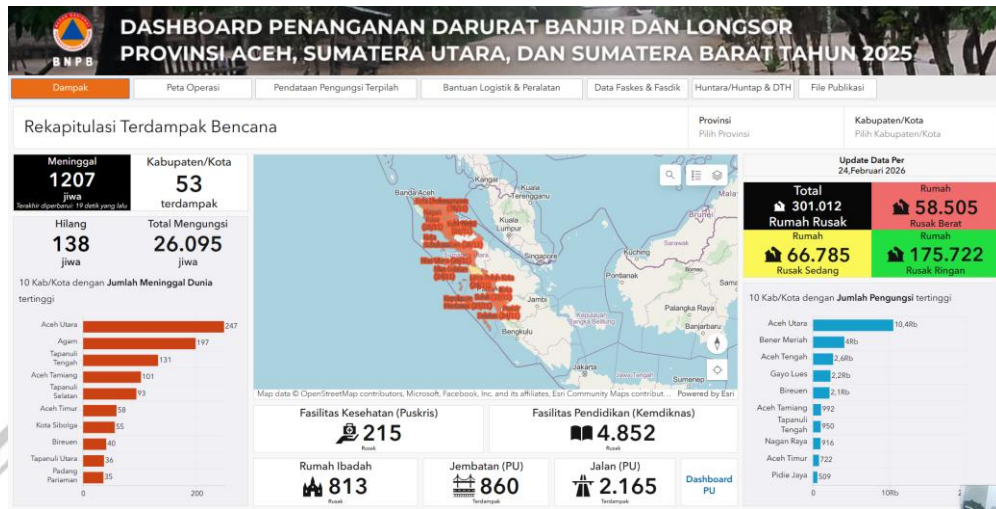
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam secara global, disebabkan oleh karakteristik geografisnya yang khas, fitur topografi, dan kondisi iklim tropis yang lembap. Terjadinya curah hujan yang signifikan, keberadaan lanskap pegunungan, dan praktik penggunaan lahan yang umumnya tidak berkelanjutan mengintensifkan paparan ini. menyebabkan wilayah ini sering dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Peristiwa ini terjadi hampir setiap tahun dan tidak jarang menimbulkan kerugian besar baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dalam beberapa kasus, skala dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga memicu perhatian dan respons publik secara nasional. Ancaman tahunan ini menjadi indikator penting perlunya pengelolaan risiko bencana yang lebih responsif dan berbasis data (Astutik & Firdaus, 2023; Wulandari et al., 2025).

Pada akhir November 2025, serangkaian bencana hidrometeorologi yang berupa banjir bandang, banjir besar, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Dampaknya signifikan, mencakup korban besar dalam hal korban jiwa, pengungsian, maupun kerusakan infrastruktur. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal yang tercatat terus meningkat dari 303 jiwa pada 30 November, menjadi 604 jiwa pada 1 Desember, hingga mencapai 1.106 jiwa per 24 Desember 2025. Selain itu, lebih dari 175 orang masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 52 kabupaten/kota terdampak langsung (BNPB, 2025a; BNPB, 2025b; Geoportal BNPB, 2025). Daerah yang mengalami dampak paling signifikan meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Utara, dan Padang Pariaman. Kerusakan rute transportasi, jembatan, dan layanan penting, termasuk listrik dan air minum, memperburuk krisis di banyak daerah. Di Aceh, pemadaman listrik berkepanjangan serta gangguan komunikasi memicu solidaritas publik yang tercermin dalam tagar populer seperti *#PrayForAceh* di media sosial (Waspada Aceh, 2025). Jumlah pengungsi juga

mencapai ratusan ribu jiwa, termasuk perpindahan besar-besaran ke pengungsian mandiri, yang menunjukkan skala krisis kemanusiaan yang luar biasa (BNPB, 2025c).



Gambar 1. 1 Rekapitulasi Terdampak Bencana

(Sumber : BNPB)

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera pada akhir tahun 2025 menggambarkan tingkat kerumitan yang signifikan, menandakan berbagai dampak yang luas di samping kesulitan geografis yang dihadapi di lokasi. Sejak awal tanggap darurat, pemerintah melalui BNPB dan Basarnas mengerahkan operasi SAR besar-besaran, memprioritaskan pencarian korban, pembukaan akses wilayah terisolir, dan distribusi logistik melalui jalur darat maupun udara. Penggunaan helikopter dan aktivasi komunikasi satelit seperti Starlink dilakukan di sejumlah wilayah dengan infrastruktur terputus (BNPB, 2025). Di Sumatera Barat, status tanggap darurat bahkan diperpanjang hingga akhir Desember karena masih berlangsungnya evakuasi dan pemulihan fasilitas dasar (BNPB, 2025). Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius, terlihat dari pengerahan 794 tenaga kesehatan yang terdiri dari tim relawan dan Emergency Medical Team ke wilayah-wilayah terdampak di Aceh, serta pendirian posko kesehatan utama (BNPB, 2025). Lebih lanjut, upaya rehabilitasi mulai disiapkan dalam bentuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas, lengkap dengan sertifikat tanah atas nama kepala keluarga. Penanganan menyeluruh ini menunjukkan upaya pemerintah dalam

menyeimbangkan aspek tanggap darurat dan pemulihan jangka panjang secara simultan.

Di tengah upaya penanganan bencana, muncul polemik publik terkait keputusan pemerintah yang tidak menetapkan banjir dan longsor Sumatera 2025 sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak karena skala korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta jumlah pengungsi dinilai telah melampaui kapasitas penanganan daerah. Sejumlah akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional agar koordinasi bantuan dan mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih maksimal (BBC Indonesia, 2025; Tempo, 2025).

Polemik semakin berkembang ketika alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional dianggap kurang transparan oleh publik. Beberapa pemberitaan menyoroti bahwa pertimbangan pemerintah terkait keputusan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dan kritik di masyarakat (Tempo, 2025). Selain itu, muncul somasi kepada Presiden terkait keputusan tersebut sebagai bentuk tekanan publik terhadap pemerintah dalam menangani krisis bencana Sumatera (KBR, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis, respons dan komunikasi pemerintah menjadi bagian penting yang mempengaruhi persepsi, legitimasi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan bencana.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera, diskursus publik berkembang tidak hanya pada penyebab bencana, tetapi juga pada respons pemerintah dalam menangani krisis. Keputusan pemerintah yang tidak menetapkan banjir Sumatera 2025 sebagai bencana nasional memunculkan berbagai kritik dan perdebatan di masyarakat. Sejumlah pihak menilai bahwa besarnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan skala pengungsian seharusnya menjadi dasar penetapan status bencana nasional guna mempercepat koordinasi bantuan dan mobilisasi sumber daya negara (Detik, 2025). Selain itu, muncul pula pandangan bahwa keputusan pemerintah tersebut dipengaruhi pertimbangan politik dan administratif tertentu sehingga memicu pertanyaan publik mengenai transparansi dan prioritas pemerintah dalam penanganan bencana (Kompas.com,

2025). Polemik tersebut memperlihatkan bahwa dalam situasi krisis, respons pemerintah tidak hanya dinilai dari tindakan penanganan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana Kebijakan dan keputusan pemerintah dipersepsikan oleh masyarakat sangat penting. Skenario ini kemudian mengkatalisasi munculnya beragam perspektif, kritik, dan tanggapan afektif dari publik di platform media sosial, yang berfungsi sebagai tempat untuk penilaian sipil atas tindakan pemerintah.

Platform media sosial, terutama Instagram, telah berkembang menjadi medium penting untuk memfasilitasi wacana publik tentang masalah sosial, meliputi kebijakan pemerintah dan peristiwa krisis. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah kolom komentar, yang memungkinkan pengguna menyampaikan berbagai reaksi dari kritik, dukungan, hingga solidaritas. Beberapa studi menegaskan bahwa bagian komentar di akun media besar berfungsi sebagai ruang vital bagi terbentuknya emosi kolektif dan wacana digital masyarakat. Sudirman dan Hasan (2023) menunjukkan bahwa Instagram menjadi saluran aktif untuk menyuarakan kritik dan solidaritas dalam berbagai isu sosial. Faradiba dan Hikmah (2023) juga menekankan bahwa kolom komentar media arus utama sering dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengekspresikan kemarahan, empati, maupun nilai-nilai solidaritas lintas kelompok. Sementara itu, studi oleh Adiwidi (2023) mencatat bahwa dalam kasus kebijakan pemerintah tertentu, sebanyak 77% komentar publik di Instagram menunjukkan sentimen negatif, termasuk sinisme dan ketidakpercayaan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Instagram bukan hanya media berbagi visual, tetapi juga arena penting bagi keterlibatan sipil dan artikulasi sentimen publik dalam menghadapi isu-isu krusial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai situasi krisis, munculnya isu-isu kontroversial kerap memicu gelombang sentimen publik yang terekam jelas di media sosial. Penolakan terhadap bantuan asing, penyebaran video yang menampilkan perilaku elite yang dianggap tidak peka, serta perdebatan tentang status darurat nasional menjadi pemicu kuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas. Studi tentang krisis COVID-19, misalnya, menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menolak bantuan internasional dan munculnya video viral pejabat yang dinilai tidak sensitif

dapat memperburuk frustrasi publik dan merusak legitimasi institusional (Romanov, 2025). Ketika respons pemerintah tidak sejalan dengan ekspektasi publik, seperti melalui hambatan birokrasi, pemotongan dana, atau pembungkai ulang narasi bantuan, sentimen negatif semakin menguat (De Lauri, 2023). Dalam kondisi darurat, strategi komunikasi yang tidak tepat atau manipulatif bahkan dapat menimbulkan kebingungan massal dan memperluas jarak antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami bagaimana isu-isu tersebut dibingkai dan diterima di ruang publik sangat penting untuk menganalisis opini masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks bencana, hal ini menjadi landasan penting untuk mengkaji respons emosional dan persepsi kritis masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan para pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi krisis berskala besar seperti bencana banjir dan longsor, pemahaman terhadap persepsi publik menjadi semakin penting. Salah satu cara untuk mendapatkan wawasan autentik dari masyarakat adalah dengan menganalisis komentar publik yang tersebar di media sosial secara sistematis. Melalui pendekatan *analisis sentimen*, *deteksi emosi*, dan *topik modeling*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap emosional, pola opini, serta topik-topik utama yang menjadi perhatian masyarakat selama fase tanggap darurat. Studi semacam ini telah terbukti mampu mengungkap perbedaan antara narasi media resmi dengan dinamika reaksi publik, serta memberikan gambaran yang lebih realistis tentang suasana hati masyarakat (Ong et al., 2022). Selain itu, pemetaan emosi dan sentimen juga membantu otoritas dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan kebijakan penanganan bencana yang responsif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat (Aswal et al., 2024). Namun, penelitian mengenai persepsi publik terhadap respons pemerintah dalam konteks bencana hidrometeorologi di Indonesia masih relatif terbatas, khususnya yang memanfaatkan komentar Instagram sebagai sumber data utama. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada platform seperti Twitter/X dan YouTube, serta hanya menitikberatkan pada analisis sentimen tanpa mengintegrasikan topic modelling dan emotion analysis secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lanskap opini dan emosi publik terhadap penanganan bencana banjir Sumatera 2025 dengan

mengolah komentar dari akun media besar melalui metode *topic modeling*, *sentiment analysis*, dan *emotion detection*. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat mengevaluasi respons pemerintah dalam situasi krisis bencana melalui media sosial. Selain memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi krisis digital, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kondisi psikososial masyarakat selama masa krisis.

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja Topik, Sentimen, dan emosi yang muncul dalam komentar-komentar netizen di Instagram terkait penanganan bencana alam di Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui topik, sentimen dan Emosi yang muncul dalam komentar-komentar netizen di Instagram terkait penanganan bencana alam di Sumatera?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam strategi komunikasi bencana, di antaranya:

1.4.1 Manfaat Akademik

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu komunikasi dengan menggali lebih dalam mengenai peran media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana untuk mengungkapkan sentimen, emosi, dan opini publik dalam konteks penanganan bencana alam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang komunikasi krisis di era digital, serta memberikan wawasan mengenai interaksi antara media sosial dan respon publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Temuan dari penelitian ini dapat memberikan arahan bagi pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat. Dengan memahami topik, sentimen, dan emosi yang muncul di kalangan netizen, pihak berwenang dapat merumuskan pesan yang lebih sesuai dan dapat diterima oleh publik.

